

PERAN PENTING MASYARAKAT DALAM PARTISIPASI PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI MADRASAH

Hartono¹

Abstract: *The role of the community to madrasah is important to create an qualified Islamic education that is participation in participating to develop the quality of education, participation among communities can do are (1) Community participation in management; include public participation in drafting the madrasah and public participation in appointment of school principals, school committees and others. (2) Public participation in the curriculum; include public participation, in implementing local curriculum, and community participation in the determination of the holiday. (3) Public participation in student recruitment; done by some community leaders to work together with teachers, before the New Year or before the lesson. (4) Public participation in the provision of funds, facilities and infrastructure; includes funding for the implementation costs for the provision of education facilities and infrastructure. (5) Public participation in the course of religious life in the madrasah. This participation of community leaders' participation in religious activities in Madrasah. (6) Public participation in employment.*

Keywords: *The role of the community, the quality of Islamic education*

Pendahuluan

Pendidikan adalah suatu proses pemindahan pengetahuan atau pun pengembangan potensi-potensi yang dimiliki oleh peserta didik untuk mencapai perkembangan secara optimal serta membudayakan manusia melalui proses transformasi nilai-nilai yang utama.² Karena pendidikan merupakan kebutuhan yang sangat pokok dan mendasar dalam membentuk kepribadian manusia.

Potensi-potensi yang dimiliki peserta didik adalah potensi dasar atau *fitrah* manusia yang harus ditumbuhkembangkan dalam kehidupan nyata di dunia ini melalui proses pendidikan, untuk selanjutnya dipertanggung-jawabkan di hadapan Allah kelak di Akhirat.³ Artinya manusia memiliki berbagai potensi yang harus dibimbing dan dilatih agar dapat tumbuh, berkembang dengan baik dan sempurna. Salah satu usaha untuk mengembangkan potensi manusia yaitu melalui pendidikan.

Proses transformasi utama tersebut, sebuah proses atau aktifitas yang di tunjukan untuk menghasilkan perubahan yang diinginkan pada perilaku kehidupan manusia. Sebagaimana pengertian pendidikan yang diungkapkan oleh F.J. Mc. Donald dalam bukunya yang berjudul *Educational Psychology* : "Education is a process or activity which is directed at producing desirable change in the behavior of human being."⁴

Perkembangan potensi-potensi manusia dimulai dari keluarga. Dalam pandangan Islam, anak adalah amanat yang dibebankan oleh Allah SWT kepada orang tuanya, karena

¹ STAI Al Hikmah Tuban

² M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), cet. 1, 99.

³ Usman Abu Bakar - Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam (Respon Kreatif Terhadap Undang-Undang Sisdiknas)*, (Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2005), cet. 1, 25.

⁴ F.J. McDonald, *Educational Psychology*, (San Fransisco, California, USA: Wadsworth Publishing Co., Inc., 1959), 4.

itu orang tua harus menjaga dan memelihara serta menyampaikan amanah itu kepada yang berhak menerima.

كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه
(رواه البيهقي)

Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka kepada orangtuanyalah yang menjadikan mereka yahudi, nasrani dan majusi. (HR. Al-baihaqi)⁵

Seorang anak yang dilahirkan oleh orang tuanya (Ibu) dalam keadaan fitrah atau suci. Bagaikan lembaran kain putih yang bersih dan belum terkena debu maupun kotoran apapun. Tergantung si pemiliknya akan di buat atau di model apa kain tersebut. Begitu juga anak, akan dijadikan Yahudi, Nasrani maupun Majusi, merupakan tanggung jawab orang tua mereka sendiri.

Adapun dalam UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan pula bahwa orang tua dari anak usia wajib belajar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya.⁶

Dan sebagaimana yang terkandung dalam firman Allah SWT surat At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٧﴾

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. (Q.S. At-Tahrim: 6)

Menjaga diri artinya setiap orang harus dapat melakukan *self education* dan melakukan pendidikan terhadap keluarganya untuk mentaati Allah SWT dan Rasul-Nya. Jadi sesuatu yang mustahil dalam pandangan Islam bila seseorang yang tidak berhasil mendidik dirinya sendiri akan dapat melakukan pendidikan terhadap orang lain.

Ketika anak semakin bertambah usianya dan membutuhkan perkembangan potensi yang lebih, tidak semua orang tua mampu memberikan pendidikan terhadap anaknya. Oleh karena itu orang tua (keluarga) memilih sekolah/madrasah sebagai penanggung jawab pendidikan terhadap anaknya.

Orang tua memiliki banyak pilihan dalam menentukan pendidikan bagi anaknya. Yaitu memilih pendidikan anaknya di sekolah dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Pondok Pesantren atau Pendidikan Luar Sekolah (PLS). Hal ini di pengaruhi oleh minat dan motivasi masyarakat untuk menyekolahkan anaknya. Dengan harapan agar anaknya berhasil dan memiliki kepribadian yang baik.

Orang tua dan masyarakat dalam hubungannya dengan penyelenggaraan pendidikan mempunyai peran yang penting yaitu sebagai mitra sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan nasional. Begitu juga penyelenggaraan pendidikan keagamaan.

Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸ Dengan demikian penyelenggara pendidikan keagamaan adalah pemerintah dalam hal ini

⁵ M. Chabib Thoah, *Kapita Selektia Pendidikan Agama Islam...*, 104.

⁶ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Penjabarannya*, (Jogjakarta: Media Wacana Press, 2003), cet. 1, 14.

⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Alwaah, 1993), 951.

⁸ Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Penjabarannya*, 23.

Kementrian Agama dan kelompok masyarakat pemeluk agama, diantaranya organisasi keagamaan dan yayasan pendidikan.

Masalah utama yang sering dihadapi oleh Madrasah adalah keterbatasan dana dan sumber daya manusia yang masih rendah sehingga mempengaruhi kualitas pendidikan. Seperti perbaikan gedung atau ruang kelas yang tertunda akibat tidak adanya biaya, tunjangan guru honorer yang sedikit dan sering tertunda pembayarannya, kurangnya pengetahuan guru tentang proses pembelajaran yang berkualitas. Meskipun banyak bantuan yang diberikan oleh pemerintah seperti adanya tunjangan bagi guru honorer, beasiswa bagi anak yang berkualitas baik dan anak dari keluarga miskin maupun Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berupa uang dan buku-buku pelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan baik umum maupun pendidikan agama Islam.

Pengelolaan Madrasah sebagai pendidikan formal masih tertinggal bila dibandingkan dengan pengelolaan pendidikan umum setingkat yang berada dibawah penyelenggaraan pendidikan nasional. Salah satu kelemahannya yaitu terlalu banyaknya mata pelajaran yang diajarkan, kualitas guru yang rendah, sarana dan prasarana pendidikan yang kurang, serta para siswa kebanyakan dari keluarga kurang mampu.⁹

Proses pendidikan di Madrasah dipengaruhi juga oleh adanya lingkungan masyarakat yang kondusif. Artinya lingkungan masyarakat juga memiliki peranan dalam pendidikan. Apabila lingkungan masyarakat mendukung akan keberadaan Madrasah maka proses pendidikan akan berjalan dengan efektif dan kualitas pendidikan, baik umum maupun agama Islam akan lebih bagus. Sehingga pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam bisa menjadi alternatif pendidikan modern.

Sejalan dengan arah kebijakan otonomi dan desentralisasi yang ditempuh oleh pemerintah, maka tanggung jawab pemerintah daerah akan lebih meningkat termasuk dalam bidang manajemen pendidikan.¹⁰ Dan juga adanya perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi tersebut menghendaki adanya partisipasi masyarakat untuk membantu pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerah di bidang pendidikan. Karena sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat. Hal ini merupakan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia yang merupakan pra syarat mutlak untuk mencapai tujuan pembangunan dimana pendidikan merupakan salah satu wahana untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia.

Mutu Pendidikan Agama Islam

1. Mutu

Mutu/kualitas diartikan sebagai tingkat baik buruknya sesuatu; kadar, derajat atau taraf ; mutu.¹¹ Dengan kata lain keunggulan yang di miliki oleh seseorang atau kelompok. Kualitas atau mutu mula-mula digunakan oleh Plato dan Aristoteles untuk menyatakan esensi suatu benda atau hal dan merupakan atribut yang membedakannya dengan benda/hal lainnya.¹² Adapun dalam kamus *Webster New World Dictionary*, pengertian kualitas yaitu *The degree of excelent of a thing*.¹³

Pengertian mutu dapat dilihat dari dua segi yaitu segi normatif dan segi deskriptif.

⁹ H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), 147-148.

¹⁰ E. Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002), iii.

¹¹ Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 533.

¹² Oemar Hamalik, *Evaluasi Kurikulum*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992), 33.

¹³ David G Burnalik, ed, *Webster New World Dictionary*, (New York: A Warner Communication Company, 1984), 488.

a. Segi Normatif

Mutu ditentukan berdasarkan pertimbangan kriteria intrinsik dan ekstrinsik. Berdasarkan kriteria intrinsik kualitas pendidikan merupakan produk pendidikan yaitu manusia yang terdidik sesuai dengan standar ideal. Sedangkan kriteria ekstrinsik, pendidikan merupakan instrumen untuk mendidik yaitu tenaga kerja yang terlatih.

b. Segi Deskriptif

Mutu ditentukan berdasarkan kenyataannya semisal hasil prestasi belajar. Menurut Nurkholis, menyebutkan bahwa kualitas memiliki dua konsep yang berbeda antara konsep absolut dan relatif. Dalam konsep absolut sesuatu (barang) disebut berkualitas bila memenuhi standar tertinggi dan sempurna.¹⁴ Bila dipraktikkan dalam dunia pendidikan yang absolut ini bersifat etitis, karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang mampu menawarkan kualitas tinggi pada peserta didik dan hanya sedikit siswa yang akan mampu membayarnya.

Dalam konsep relatif, kualitas bukanlah tujuan akhir, melainkan alat ukur atas produk akhir dari standar yang telah ditentukan. Mutu merupakan proses terstruktur yang membantu seseorang menetapkan apakah sasaran yang diharapkan tercapai dengan memperbaiki setiap proses pendidikan.

Mutu pendidikan disebut sebagai nilai atau suatu keadaan secara substantif. Mutu mengandung sifat dan taraf. Sifat adalah suatu yang menerangkan keadaan, sedangkan taraf menunjukkan kedudukan dalam skala (Sanusi, 1995).¹⁵ Dalam konteksnya mutu yang dimaksud adalah dalam konsep relatif.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa mutu adalah suatu nilai atau tindakan yang digunakan sebagai alat ukur atas produk akhir dari standar yang telah ditentukan.

Adapun hakikat mutu dalam pendidikan sebagaimana diungkapkan oleh Dr. W. Deming antara lain:¹⁶

1. Menciptakan konsistensi tujuan. Menciptakan konsistensi tujuan untuk memperbaiki layanan dan siswa dimaksudkan untuk menjadikan madrasah sebagai madrasah yang kompetitif dan berkelas dunia.
2. Mengadopsi filosofi mutu total. Pendidikan berada dalam lingkungan yang benar-benar kompetitif dan hal tersebut dipandang sebagai salah satu alasan mengapa Amerika kalah dalam keunggulan kompetitifnya.
3. Mengurangi kebutuhan pengujian. Mengurangi kebutuhan pengujian dan inspeksi yang berbasis produksi massal dilakukan dengan membangun mutu dalam layanan pendidikan. Memberikan lingkungan belajar yang menghasilkan kinerja siswa yang bermutu.
 - 1) Menilai bisnis sekolah dengan cara baru. Nilailah bisnis sekolah dengan meminimalkan biaya total pendidikan. Pandanglah sekolah sebagai pemasok siswa dari kelas satu sampai kelas-kelas selanjutnya. Bekerja bersama orang tua siswa dan berbagai lembaga untuk memperbaiki mutu siswa menjadi bagian system.
 - 2) Memperbaiki mutu dan produktivitas serta mengurangi biaya. Memperbaiki mutu dan produktivitas, sehingga mengurangi biaya, dengan melembagakan proses "rencanakan/periksa/ubah". Gambarkan proses untuk memperbaiki, mengidentifikasi bidang-bidang perbaikan; implementasikan perubahan, nilai dan

¹⁴ Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, : Teori, Mode dan Aplikasi*, (Jakarta: Grasindo, 2003) 67.

¹⁵ Moh Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori, Konsep dan Issu)*, (Bandung: Al-Fabeta, 2004), 51.

¹⁶ Jerom W Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan*, (yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 85.

- ukur hasilnya, dan dokumentasikan serta standarisasikan proses. Awali siklusnya dari awal lagi untuk mencapai standar yang lebih tinggi lagi.
- 3) Belajar sepanjang hayat. Mutu diawali dan diakhiri dengan latihan. Bila anda mengharapkan orang mengubah cara bekerja mereka, anda mesti memberi mereka perangkat yang diperlukan untuk mengubah proses kerja mereka. Pelatihan memberikan perangkat yang dibutuhkan untuk memperbaiki proses kerja.
 - 4) Kepemimpinan dalam pendidikan. Merupakan tanggungjawab manajemen untuk memberikan arahan. Para manajer dalam manajemen mesti mengembangkan visi dan misi untuk wilayah, sekolah atau jurusannya. Visi dan misi harus didukung oleh para guru, staf, siswa, orang tua dan komunitas. Mutu mesti terintegrasikan dalam pernyataan visi dan misi. Akhirnya, manajemen mesti mau mendengar. Manajemen mesti mengajarkan dan mempraktikkan prinsip-prinsip mutu.
 - 5) Mengeliminasi rasa takut. Lenyapkanlah bekerja karena dorongan rasa takut dari wilayah. Sekolah, atau jurusan, maka setiap orang akan bekerja secara efektif untuk perbaikan sekolah. Ciptakanlah lingkungan yang akan mendiring orang lain untuk bebas berbicara. Hubungan yang memandang orang lain sebagai lawan sudah ketinggalan zaman dan kontra produktif.
 - 6) Mengeliminasi hambatan keberhasilan. Manajemen bertanggungjawab untuk menghilangkan hambatan yang menghalangi orang mencapai keberhasilan dalam menjalankan pekerjaannya. Menghalangkan rintangan diantara bagian. Orang dibagian pengajaran, pendidikan luar biasa, akunting, kantin, administrasi, pengembangan kurikulum, riset dan kelompok lain harus bekerja sebagai sebuah tim. Mengembangkan strategi-strategi gerakan: gerakan dari kompetisi menjadi kolaborasi dengan kelompok lain, gerakan dari revolusi kalah-menang menjadi menang-menang, gerakan dari mengisolasi pemecahan masalah menjadi bersama-sama memecahkan masalah; gerakan dari memegang informasi menjadi informasi; gerakan dari bertahan dari perubahan menyambut baik perubahan.
 - 7) Menciptakan budaya mutu. Ciptakanlah budaya mutu. Jangan biarkan gerakan menjadi bergantung pada seseorang atau sekelompok. Ciptakanlah budaya mutu yang mengembangkan budaya tanggungjawab pada setiap orang.
 - 8) Perbaiki proses. Tidak ada proses yang pernah sempurna, karena itu, carilah cara terbaik, proses terbaik, terapkan tanpa pandang bulu. Menemukan solusi harus didahulukan, dan bukan mencari-cari kesalahan. Hargailah orang atau kelompok yang mendorong terjadinya perbaikan.
 - 9) Membantu siswa berhasil. Hilangkanlah rintangan yang merampok hak siswa, guru atau administrator untuk memiliki rasa bangga pada hasil karyanya. Orang mesti berkeinginan untuk terlibat dan pekerjaannya diselesaikan dengan baik. Tanggungjawab semua administrator pendidikan mesti diubah dari kuantitas menjadi kualitas.
 - 10) Komitmen. Manajemen mesti memiliki komitmen terhadap budaya mutu. Manajemen mesti berkemauan untuk mendukung memperkenalkan cara baru dalam mengerjakan sesuatu ke dalam sesuatu ke dalam system pendidikan. Manajemen mesti mendukung tujuan dengan memberikan sarana untuk mencapai tujuan tersebut atau resiko munculnya ketidaksenangan di dalam system. "kerjakan dengan tepat pada kesempatan pertama" merupakan tujuan utama. Para pegawai menjadi frustrasi bila manajemen tidak mau mengerti masalah yang dihadapi para pegawai dalam mencapai tujuan atau tidak peduli untuk mencari penyelesaian terhadap masalah.
 - 11) Tanggung jawab. Birkanlah setiap orang disekolah untuk bekerja menyelesaikan transformasi mutu. Transformasi merupakan tugas setiap orang.

2. Pendidikan Agama Islam

Secara istilah, beberapa ahli pendidikan mendefinisikan pendidikan Islam sebagai berikut:

a. Abdurrahman Saleh Abdullah

Pendidikan adalah proses yang dibangun oleh masyarakat untuk membawa generasi-generasi baru ke arah kemajuan dengan jalan-jalan tertentu sesuai dengan kemampuan mereka yang berguna untuk mencapai tingkat kemajuan yang paling tinggi.¹⁷

b. Shaikh Mustafa al-Ghulayani

التربية هي غرس الأخلاق الفاضلة في نفوس الناشئين وسقيها بماء الإرشاد والنصيحة حتى تصبح ملكة ثم تكون ثمراتها الفضيلة والخير وحب العمل لنفع الوطن.¹⁸

Pendidikan adalah menanamkan akhlak yang mulia dalam jiwa anak didik dan menyiraminya dengan petunjuk dan nasihat, sehingga menjadi tabiat jiwa yang membuahkan keutamaan, kebaikan serta cinta bekerja yang berguna bagi tanah air.

c. Ahmad D. Marimba

Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani anak si terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang sempurna menurut ukuran-ukuran Islam.¹⁹

Dari beberapa pengertian pendidikan Islam tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa pendidikan agama Islam adalah usaha untuk membimbing pertumbuhan kepribadian peserta didik secara sistematis supaya mereka hidup sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tercipta kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dengan kata lain yang harus didahulukan dalam pembelajaran PAI adalah penanaman nilai keimanan yang teguh. Sebab dengan adanya keimanan yang teguh akan menghasilkan ketaatan dalam menjalankan kewajiban agama. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Adz-Dzaariyaat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ²⁰

"Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku"

Disamping beribadah, setiap manusia memiliki cita-cita untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Allah Berfirman dalam Surat. Al-Baqarah ayat 201

وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ¹⁶

"Dan diantara mereka ada yang berdo'a: "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat dan peliharalah kami dari siksa api neraka".

Kebaikan di dunia diartikan sebagai nikmat dan kebaikan di akhirat diartikan sebagai surga. Sedangkan peliharalah kami dari siksa api neraka yakni tidak memasukinya. Ini merupakan lukisan tentang keadaan orang-orang musrik dan keadaan orang-orang yang beriman yang tujuannya ialah supaya kita mencari makna kehidupan dunia dan akhirat.²²

Namun pendidikan agama Islam disekolah/ lembaga pendidikan bukanlah pengajaran pengetahuan agama dan praktik ibadah semata, akan tetapi yang terpenting adalah

¹⁷ Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, terj H M Arifin dan Zainudin, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), cet ke 3, 15.

¹⁸ Mustafa al-Ghulayani, *Iddatun Nasyi'in*, (Beirut: Maktabah Asriyah li al-Taba'at wa al-Nasyr, 1953), 185.

¹⁹ Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), 19.

²⁰ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Alwaah, 1993), 62.

¹⁶ *Ibid.*

²² Imam Jalaludin al-Mahllly dan Imam Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalin*, jilid I, penerjemah: Balyan Abu Bakar, dkk, (Bandung: Sinar Baru, 1999), Cet 1, 109.

membentuk budi pekerti yang luhur, sehingga pendidikan agama menekankan pada moral dan pendekatan spiritual.²³

3. Mutu Pendidikan Agama Islam

Proses pendidikan sebagai bagian yang sangat penting bagi tercapainya pendidikan yang bermutu tinggi. Sebagaimana dikemukakan oleh Umar Tirtorahardjo bahwa “permasalahan dari mutu pendidikan lebih terletak pada masalah proses pendidikan”,²⁴ karena terdapat komponen-komponen yang akan sangat menentukan tercapainya suatu pendidikan yang diharapkan.

Adapun beberapa komponen tersebut antara lain:

a. Tujuan

Tujuan pendidikan dan pengajaran harus dipahami dan dimengerti, sebab tujuan merupakan gambaran, sasaran, dan pengarah, bagi tindakan guru untuk menjalankan fungsinya. Tujuan pendidikan dan pengajaran membentuk manusia yang cakap, warga negara yang demokratis, dan bertanggung jawab, tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air.²⁵

Di samping itu tujuan juga berfungsi sebagai kriteria dalam pemilihan dan penentuan materi, alat, metode, dan evaluasi mengajar.

b. Materi

Materi merupakan bahan yang akan disampaikan dalam kegiatan belajar-mengajar. Menurut Nasution, adalah tiga sumber, yaitu: masyarakat dan budayanya; anak; dan disiplin ilmu.²⁶

Sedangkan menurut Hida Taba sebagaimana dikutip oleh Nasution, mengemukakan kriteria materi memenuhi validitas pengetahuan, relevansi, keseimbangan keanekaragaman tujuan, kemampuan murid serta kebutuhan dan minat murid.²⁷

c. Metode

Metode merupakan suatu cara berfungsi sebagai penyampai pengetahuan, keterampilan, sikap peserta didik.

d. Alat

Alat merupakan sarana pengajaran berfungsi untuk membantu tercapainya suatu tujuan, menjalin komunikasi yang harmonis antara guru dan peserta didik dalam kegiatan belajar-mengajar.

e. Evaluasi

Evaluasi merupakan bagian dari integral kegiatan belajarmengajar, harus dilaksanakan secara kontinue untuk mencapai tujuan pendidikan. Evaluasi selain untuk siswa, juga untuk dirinya sendiri, agar dapat mencapai hasil yang maksimal.

f. Manajemen yang efektif dan efisien

Menurut Dr. E. Mulyasa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerja sama yang sistematis, sistemik dan komprehensif untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.²⁸

Manajemen, yang bermakna pengelolaan, merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari suatu proses pendidikan secara keseluruhan. Tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dicapai secara optimal, efektif dan efisien. Manajemen yang

²³ Harun Nasution, *Islam Rasional (Gagasan dan Pemikiran)*, (Bandung: Mizan, 1998), cet 5, 386.

²⁴ Umar Tirtorahardjo, et al, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Rineka Cipta, 1998), 233.

²⁵ Zuhairini, dkk, *Metode Khusus Pendidikan Agama*, (Malang: Biro Alamiah FT IAIN Sunan Ampel, 1991), 13.

²⁶ S Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993), Cet 5 54.

²⁷ *Ibid*, 70

²⁸ E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, (Bandung: PT Rosdakarya, 2002), 19.

efektif dan efisien pada masa sekarang disebut dengan manajemen berbasis sekolah, yaitu suatu manajemen yang memberikan wewenang penuh kepada sekolah dan guru yang mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggung jawab kan, mengatur serta memimpin sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan Pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah.²⁹

- g. Buku dan sarana belajar yang memadai dan selalu dalam kondisi siap pakai
Hampir sebagian besar Sekolah Dasar di Indonesia, apalagi sekolah-sekolah swasta cenderung kekurangan buku-buku pelajaran. Padahal buku merupakan unsur esensial yang tidak bisa diabaikan untuk meningkatkan mutu hasil belajar siswa. Pemerintah perlu berupaya mengembangkan usaha-usaha pengadaan buku. Di antaranya mendistribusikan buku untuk sekolah-sekolah di seluruh pelosok desa dan mengadakan perpustakaan keliling.
- h. Fisik dan penampilan sekolah yang baik
Lingkungan sekolah sangat berperan dalam mendukung kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Menurut pengalaman, cenderung bula lingkungan sekolah bersih dan nyaman anak-anak akan bersemangat untuk belajar.
- i. Partisipasi aktif masyarakat
Partisipasi masyarakat merupakan modal dasar atas keberhasilan sebuah sekolah, baik fisik, psikologis, maupun hasil kelulusan sekolah, sebab akan membentuk lingkungan yang kondusif, saling menjaga, berinteraksi, dan saling membutuhkan demi peningkatan kualitas sekolah.
Hubungan sekolah dengan masyarakat merupakan sebuah sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Sebagaimana dikemukakan oleh Mulyasa bahwa:
"Hubungan sekolah dengan masyarakat bertujuan memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan anak, memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan masyarakat serta mengarahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah. Untuk merealisasikan tujuan tersebut dapat dilakukan dengan memberitahu masyarakat mengenai program-program sekolah, baik program yang telah dilaksanakan, sedang dilaksanakan maupun yang akan datang, sehingga masyarakat mendapat gambaran yang jelas tentang sekolah".³⁰
- j. Hasil Pendidikan
Menurut Ahmad Sanusi dikutip oleh Sufyarma mengemukakan, bahwa ada empat pengertian tentang hasil pendidikan yaitu:
 - a. Hasil pendidikan dengan arti layanan pendidikan, maksudnya banyak layanan pendidikan yang dapat diciptakan atau diproduksi dan ditawarkan.
 - b. Hasil pendidikan merupakan perolehan yang dicapai peserta didik dari berbagai kegiatannya.
 - c. Hasil pendidikan dalam arti prestasi ekonomis-finansial yang ditampilkan dan diterima peserta didik sesudah selesai mengikuti program pendidikannya.
 - d. Hasil pendidikan merupakan out put sosial budaya yang diciptakan, diproduksi dan diserahkan oleh para lulusannya kepada masyarakat.³¹
 Dari keempat pengertian tersebut dapat diketahui bahwa hasil pendidikan tidak lepas dari kinerja sekolah berwujud hasil usaha atau prestasi yang dilakukan sekolah.

²⁹ Soebagio Admodiwirio, *Manajemen Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: PT Ardadizya Jaya, 2000), 20

³⁰ E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah*, 51.

³¹ Sufyarma, *Kapita Selekta Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2003), 209.

Partisipasi Masyarakat Dalam Kualitas Pendidikan Agama Islam

Hubungan yang harmonis antara Madrasah dengan masyarakat yang sadar akan pendidikan sangat dibutuhkan. Masyarakat disebut sebagai lingkungan pendidikan non formal yang memberikan pendidikan secara sengaja dan berencana kepada seluruh anggotanya, tetapi tidak sistematis.³² Dari hubungan tersebut diharapkan masyarakat mempunyai derajat kepemilikan atau rasa memiliki.

Sekolah dan Madrasah sekarang ini senantiasa bekerja keras untuk menarik minat dan motivasi masyarakat dengan meningkatkan mutu pendidikan. Baik pada pendidikan yang bersifat umum maupun *agamis* (Pendidikan Agama Islam) dan menyelenggarakan pendidikan yang berbasis masyarakat.

Undang-undang No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, menjelaskan bahwa "pendidikan berbasis masyarakat merupakan penyelenggaraan pendidikan yang berdasarkan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat".³³ Madrasah dengan menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat (*community based education*), mengharap kepada masyarakat agar merasa memiliki (*sense of belonging*) terhadap pendidikan di madrasah.

Kepemilikan berimplikasi adanya pengendalian penuh terhadap pengembalian keputusan, tetapi dalam konteks ini lebih jelas Syaiful Sagala dalam bukunya yang berjudul *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah dan Masyarakat* menekankan bahwa berbasis masyarakat bukan di artikan memiliki atau menguasai, melainkan masyarakat menjadi bagian yang penting dalam peningkatan mutu pendidikan.³⁴ Untuk itu meningkatnya kualitas pendidikan agama Islam khususnya, tidak terlepas dari adanya keikutsertaan masyarakat dalam bertanggungjawab bersama mencapai tujuan pendidikan yang hakiki.

Adapun partisipasi merupakan keterlibatan atau peran serta seseorang baik dilakukan secara individu maupun kelompok dalam suatu kegiatan tertentu. Menurut Santoso Sastropetro di kutip dari Ilmuwan Keith Davis mendefinisikan³⁵: "*Participation can be defined as mental and emotional involvement of a person in a group situation wich encourages him to contribute to group goals and share responsibility in them*". Selanjutnya ia mengemukakan pula bahwa; "*There are three ideas in this wich are important to manager who will practice the art of participation...*"

Partisipasi dapat didefinisikan sebagai keterlibatan mental/pikiran dan emosi/perasaan seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan, memiliki beberapa tingkatan:

- a. Derajat keterlibatan, mulai dari sekedar mengetahui adanya suatu usaha sampai dengan ikut aktif menyumbangkan pikiran, tenaga, maupun materi.
- b. Prakarsa keterlibatan, yang dapat dibedakan antara keterlibatan spontan dengan persuasi atau melalui paksaan. Yaitu tingkat otoritas, yang pada dasarnya memberikan wewenang kepada kelompok untuk memantapkan keputusannya. Kewenangan tersebut dapat bersifat resmi kalau kelompok memberikan kepada pimpinan konsep keputusan yang kemudian dapat diresmikan.

³² Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan: Umum dan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), 157.

³³ Undang-Undang No 20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya, (Jogjakarta: Media Wacana Press, 2003), Cet 1, 36.

³⁴ Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah Dan Masyarakat Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, (Jakarta: PT Nimas Multima, 2004), 157.

³⁵ RA Santoso Sastropetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, (Bandung: Alumni, 1988), 13.

- c. Organisasi keterlibatan, yang dapat dibedakan menjadi keterlibatan perseorangan atau secara kelompok. Hal ini dapat dikatakan sebagai tingkat penasihat/sugesti yang dibangun atas dasar saling mengerti. Oleh karena itu para anggota kelompok pada hakekatnya sudah cenderung siap untuk memberikan suatu usul atau saran kalau telah memahami masalah atau situasi yang dihadapkan kepada mereka
- d. Sikap dalam keterlibatan, mulai dengan yang mendukung, setuju sampai yang menentang. Hal ini merupakan tingkat saling mengerti yang tujuannya untuk membantu para anggota kelompok agar memahami masing-masing fungsi dan sikap yang dapat mengembangkan kerja sama yang lebih baik. Dengan demikian secara pribadi mereka akan lebih banyak terlibat, bersikap kreatif dan juga lebih bertanggung jawab.

Sekolah-sekolah Islam seperti Madrasah Ibtidaiyah sebagian besar masih sering menghadapi kekurangan biaya dalam mengadakan alat pengajaran. Dalam hal ini seringkali yayasan kurang memperhatikan unsur-unsur tersebut.³⁶ Selain itu kondisi lingkungan yang kurang kondusif juga mengganggu proses pembelajaran yang ada di madrasah.

Oleh karena itu masyarakat atau orang tua siswa sebagai mitra madrasah berkesempatan seluas-luasnya untuk berperan serta dalam penyelenggaraan pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang di dasari dengan pendidikan keluarga. GBHN 1988 dengan jelas menempatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; pendidikan swasta sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional perlu terus di dorong untuk meningkatkan pertumbuhan, peranan dan tanggung jawab serta mutu pendidikannya yang tetap mengindahkan ciri-ciri khas perguruan swasta yang bersangkutan serta syarat-syarat pendidikan secara umum.³⁷

Masyarakat yang dimaksud adalah bukan hanya orang tua siswa akan tetapi orang-orang atau golongan yang memiliki kepentingan bersama dalam suatu tindakan tertentu dan konsekuensinya serta yang dipengaruhinya disebut *stakeholder*.³⁸

Beberapa macam stakeholder menurut konteks antara lain semua aktor dalam konteks kelembagaan disebut sebagai stakeholder potensial. Yaitu kelompok yang memiliki keputusan-keputusan yang akan dibuat berkenaan dengan agenda pendidikan dan organisasi-organisasi yang berpartisipasi dalam proses ketetapan pendidikan.

Sedangkan kelompok yang mengejar kepentingan mereka dalam situasi (konteks) suatu organisasi tertentu dalam institusi disebut stakeholder kinetik atau aktif.³⁹ Ia terlibat aktif dalam pengambilan keputusan dan perencanaan organisasi meningkatkan kemungkinan tindakan yang berhasil. Pengambilan keputusan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan informasi tentang cakupan perhatian, sasaran dan komitmen dari penerima keuntungan dengan program yang diharapkan, serta tentang sarana alternatif untuk memenuhi sasaran dan perhatian tersebut sambil melanjutkan komitmen itu. Misalnya keterlibatan orang tua dalam merancang suatu unit kurikulum baru dapat menyiagakan para perancang dalam topik-topik sensitif yang harus dihindari. Para guru mungkin dapat menyerahkan alternatif untuk mengorganisir unit tersebut.

Desentralisasi merupakan suatu metode utama bagi keterlibatan stakeholder. Akan tetapi dengan metode ini tidak semua masyarakat berpartisipasi dengan intensitas yang sama di semua kesempatan. Sebagaimana 3 kategori stakeholder berikut:

1. Produsen

Suatu kategori stakeholder yang memperhatikan keputusan tentang konsepsi dan rancangan proses pendidikan, pelatihan personal yang akan dilibatkan, serta produksi

³⁶ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), 94.

³⁷ HAR Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), cet 4, 83.

³⁸ NMc Ginn-TWelsh, *Desentralisasi Pendidikan*, (Jakarta: Logos, 2003), 86.

³⁹ *Ibid*, 87.

fasilitas dan material yang akan digunakan. Fokusnya adalah konstruksi atau produksi kapasitas untuk mendidik. Stakeholder ini meliputi:

- a. Perusahaan konstruksi
- b. Perusahaan yang menghasilkan materi pengajaran termasuk buku teks
- c. Penjual pakaian seragam
- d. Penulis buku teks dan kurikulum

Perhatian utama stakeholder ini ialah persediaan atau produksi input ke proses pendidikan. Karena ekonomi skala kebanyakan organisasi ini ialah organisasi-organisasi Nasional, bahkan di negara-negara yang tingkat desentralisasinya tinggi sekalipun. Di AS, dimana distrik sekolah bisa menggunakan buku teks apa saja yang mereka inginkan. Kebanyakan distrik membeli satu set lengkap yang mencakup semua kelas dari salah satu lima penerbit Nasional.⁴⁰

2. Distributor

Perangkat minat kedua terfokus pada lokasi keputusan tentang distribusi produk yang ada. Keputusan ini mengenai akses kependidikan dan proses pengajaran (termasuk penilaian belajar yang masuk dalam bagian dari pengajaran). Keputusan tentang dimana sekolah melibatkan stakeholder yang berbeda-beda dibanding keputusan tentang apakah sekolah akan dibangun, juga siapa yang akan dipertahankan.

Proses pengajaran itu sendiri memerlukan keputusan yang dibuat terutama oleh para guru dengan tingkat kontrol tidak langsung yang bermacam-macam oleh administrator, pengurus dan lain-lain. Kategori ini meliputi: (a) Kelompok orang tua, (b) Wakil guru (yaitu persatuan), (c) Manager sekolah dan, (d) Kelompok-kelompok pengelola yang dibatasi dalam keputusan tentang aplikasi kurikulum resmi

3. Pengguna

Perangkat stakeholder ketiga memperhatikan manfaat hasil pendidikan yang dapat diambil. Pendidikan mentransformasikan individu, memberi mereka pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai baru. Transformasi ini dapat menguntungkan individu-individu yang ditransformasikan dan mereka yang dapat memperoleh keuntungan dari pengetahuan yang meningkat, ketrampilan dan nilai-nilai. Para siswa dan orang tua dapat menggunakan pengetahuan dan sertifikasi untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Stakeholder ini lebih mengutamakan mutu pendidikan dan tentang pembiayaannya. Perhatiannya didorong oleh bagaimana pendidikan berhubungan dengan sasaran mereka dan terutama tidak berhubungan dengan aspek teknis pendidikan itu sendiri.⁴¹

Dalam hal ini Madrasah yang menerapkan manajemen berbasis sekolah memiliki karakteristik partisipasi warga sekolah dan masyarakat yang tinggi. Hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki diikuti makin besar rasa tanggung jawab dan seterusnya makin besar tingkat dedikasinya.⁴² Sebagai bagian dari masyarakat, setiap individu dituntut peran sertanya dalam kegiatan-kegiatan pembangunan di semua bidang pembangunan, terutama sekali pada bidang masing-masing.⁴³

Untuk itu Madrasah sebagai lembaga kemasyarakatan yang mempunyai potensi keagamaan dan kependidikan yang mengakar dalam kehidupan masyarakat tidak dapat dilepaskan dari perkembangan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan masyarakat harus dijadikan sebagai pendukung utama Madrasah (stakeholder atau user) untuk meningkatkan kepentingan dalam mengembangkan pendidikan yang berbasis

⁴⁰ *Ibid*, 89.

⁴¹ *Ibid*, 90.

⁴² Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah Dan Masyarakat Strategi*, 162.

⁴³ Ali Yafie, *Mengupas Fiqih Sosial Dari Sosial lingkungan Hidup: Asuransi Hingga Ukhuwah*, (Bandung: Mizan, 1995), cet 3, , 159.

masyarakat (*community based education*). Dengan kata lain masyarakat yang bertanggung jawab terhadap kemajuan madrasah.⁴⁴

Partisipasi masyarakat dalam pendidikan agama Islam di Madrasah sudah sepatutnya dilakukan khususnya oleh masyarakat yang beragama Islam. Dalam Islam sendiri, partisipasi disebut sebagai *jihad*. Karena hal ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat terhadap berkembangnya agama Islam dan *jihad fi sabilillah*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 122.

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً ۚ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ (التوبة: 122) ⁴⁵

“Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang). Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka Telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya. (Q.S. At-Taubat: 122)

Dari ayat ini mengandung arti bahwa umat Islam dituntut untuk mendukung jalannya pendidikan sebagaimana ayat di atas bahwa menuntut ilmu itu juga penting sebagaimana berjihad di medan perang. Dukungan itu dapat dilakukan dengan cara memberikan segala kemampuan yang dimilikinya ke jalan Allah SWT. Maka dari itu sumbangsih masyarakat Islam terhadap pendidikan juga dapat disebut sebagai jihad. Yang dimaksud jihad disini adalah bukan semata-mata mengangkat senjata, melainkan dengan sungguh-sungguh usaha dan kegiatan menuju ke arah kemajuan dan kesempurnaan di jalan Allah yang terkenal dengan tugas amar ma’ruf nahi mungkar. Firman Allah dalam surat Al-Imron ayat 110

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ (ال عمران: 110)⁴⁶

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik”.(Q.S. ali-Imron:110)

Pada dasarnya partisipasi masyarakat memiliki 3 konsep yang mana madrasah dan masyarakat merupakan partnership dalam berbagai aktivitas yang berkaitan dengan aspek-aspek pendidikan, yaitu:

- Sekolah/Madrasah dengan masyarakat merupakan satu keutuhan dalam menyelenggarakan pendidikan dan pembinaan pribadi peserta didik.
- Sekolah/Madrasah dengan tenaga kependidikan menyadari pentingnya kerjasama dengan masyarakat, bukan hanya dalam melakukan pembaruan tetapi juga dalam menerima berbagai konsekuensi dan dampaknya, serta mencari alternatif pemecahannya.
- Sekolah/Madrasah dengan masyarakat sekitar memiliki andil dan mengambil bagian serta bantuan dalam pendidikan di Sekolah/Madrasah, untuk mengembangkan berbagai potensi yang ada sesuai dengan harapan peserta didik.

Para pendidik profesional setuju bahwa masyarakat dan terutama orang tua memberikan sumbangan penting bagi pekerjaan mereka. Partisipasi yang diminta biasanya berupa dukungan dari masyarakat atas apa yang sedang di coba dilakukan Madrasah. Yakni

⁴⁴ Qodri A Azizy, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangaun Etika Sosial (Mendidik Anak Sukses Untuk Masa Depan: Pandai dan Bermamfaat)*, (Semarang: CV Aneka Ilmu, 2003), 22.

⁴⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV Alwaah, 1993), 301.

⁴⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 94.

para guru dan kepala Madrasah dukungannya pun berupa penyediaan tenaga kerja dan meterial bangunan dan pemeliharaan gedung yang menjamin bahwa para siswa mengerjakan pekerjaan rumah mereka.

Oleh karena itu tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dianggap sebagai kegagalan masyarakat untuk menghargai nilai pendidikan. Pendidikan harus dikaitkan kepada kebutuhan-kebutuhan produksi masyarakat, sekolah-sekolah membantu memikul biaya operasionalnya sendiri dan menjadi bagian integral dalam komunitas yang mereka layani.⁴⁷

Sebagai umat Islam dituntut untuk selalu berjuang/berjihad dengan sungguh-sungguh di jalan Allah, sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Apabila mampu dengan tangannya hendaklah mau dengan ikhlas menyumbangkan tenaganya, apabila mampu dengan lisannya, maka mereka harus berani mengatakan dengan tegas yang hak dan yang bathil, mencarikan solusi yang baik untuk kebenaran di jalan Allah seperti sebagai ustadz, guru, dan lain-lain. dan apabila hanya mampu dengan hatinya, maka mereka harus meyakini dengan seyakain-yakinnya apa yang diperintah-Nya dan apa yang dilarang-Nya. Sebagaimana sabda Nabi Saw.:

عن ابوا سعيد بن الخديري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده. فإن لم يستطع فبلسا نه. فإن لم يستطع فبقليه. وذلك اضعف الايمان (رواه مسلم)⁴⁸

Dari Abu Sa'id bin Khudri, r.a., berkata: saya mendengar Rasulullah Saw bersabda: barang siapa mengetahui barang yang mungkar, maka hendaklah mengubah dengan tangannya, bila tidak mampu hendaklah dengan lisannya, bila tidak mampu hendaklah dengan hatinya dan yang demikian itu merupakan iman yang paling lemah. (H.R. Muslim)

Menurut pandangan Islam, pada dasarnya manusia memiliki dua bentuk kemampuan yang dapat dipergunakan untuk berpartisipasi (jihad) di jalan Allah, yaitu berupa harta dan jiwa. Sebagaimana firman Allah Swt dalam surat Al-Hujurat ayat 15 :

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ
الصَّادِقُونَ ﴿١٥﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya (beriman) kepada Allah dan Rasul-Nya, Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang (berjihad) dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. mereka Itulah orang-orang yang benar. (Q.S. Al-Hujurat: 15)

Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam ikut berpartisipasi terhadap pendidikan di Madrasah yaitu:⁴⁹

- a) Minat dan motivasi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan. Dengan mengenyam pendidikan masyarakat berharap memiliki kemampuan membaca, menulis, berhitung dan mendapatkan pengetahuan terhindar dari kemiskinan, mendapatkan kedudukan sosial dan percaya terhadap diri sendiri.
- b) Penginterpretasian yang dangkal terhadap agama. Dengan mendapatkan pendidikan agama di Madrasah mereka berharap dapat bertingkah laku dengan baik sesuai dengan kepribadiannya.
- c) Kecendrungan untuk menyalah artikan motivasi dan kepentingan organisasi penduduk yang biasanya mengarah kepada timbulnya persepsi yang salah terhadap keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk dapat halnya terjadi di beberapa Negara.

⁴⁷ Philip Robinson, *Beberapa Perspektif Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: CV Rajawali, 1986), 341.

⁴⁸ Imam Abi Khusain Muslim bin Al-Khajaj, *Shakhih Muslim 2*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), 45-46.

⁴⁹ RA Santoso Sastropoetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, 22.

- d) Tersedianya kesempatan kerja yang lebih baik di luar pedesaan. Masyarakat beranggapan bahwa hidup di luar (kota) lebih terjamin dari pada kehidupan di desa.
- e) Tidak terdapatnya kesempatan untuk berpartisipasi dalam hal pembangunan.

Adapun sifat dan ciri-ciri partisipasi masyarakat tersebut antara lain: Partisipasi bersifat sukarela, Berbagai isu dan masalah haruslah disajikan dan dibicarakan secara jelas dan objektif, Kesempatan untuk berpartisipasi haruslah mendapat keterangan/informasi yang jelas dan memadai tentang setiap segi atau aspek dari program yang akan didiskusikan, Partisipasi masyarakat dalam rangka menentukan kepercayaan terhadap diri sendiri haruslah menyangkut berbagai tingkatan dan berbagai sektor, bersifat dewasa, penuh arti, berkesinambungan dan aktif.

Partisipasi Masyarakat Dalam Peningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Madrasah

1. Manajemen Berbasis Sekolah

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur.⁵⁰ Manajemen adalah suatu kegiatan, pelaksanaannya adalah “managing” – pengelolaan-, sedang pelaksanaannya disebut manager atau pengelola.⁵¹

Dalam bukunya yang berjudul *Management*, Peter P. Schoderbeck mengatakan “*Management is a process of achieving organizational goals through others*”.⁵²

Dengan demikian manajemen lebih ditekankan pada upaya untuk mempergunakan sumber daya seefisien dan seefektif mungkin. Adapun tujuan utama dari manajemen menurut Nanang Fattah adalah produktivitas dan kepuasan. Produktivitas sendiri diartikan sebagai ukuran kuantitas dan kualitas kinerja dengan mempertimbangkan kemanfaatan sumber daya.⁵³

Menurut E. Mulyasa, istilah manajemen memiliki banyak arti, bergantung pada orang yang mengartikannya. Istilah manajemen sekolah capkai disandingkan dengan istilah administrasi sekolah. Berkaitan dengan itu, terdapat tiga pandangan berbeda; pertama, mengartikan administrasi lebih luas daripada manajemen (manajemen merupakan inti dari administrasi); kedua, melihat manajemen lebih luas daripada administrasi dan ketiga; pandangan yang menganggap bahwa manajemen identik dengan administrasi.⁵⁴

Secara leksikal, manajemen berbasis sekolah (MBS) berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sekolah adalah lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut maka MBS dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berdasarkan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran.⁵⁵

Menurut Mallen, Ogawa dan Kranz, sebagaimana dikutip oleh Ibtisam Abu Duhou, secara konseptual manajemen berbasis sekolah dapat digambarkan sebagai suatu perubahan formal struktur penyelenggaraan, sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting yang dengannya peningkatan dapat didorong dan ditopang.⁵⁶

⁵⁰ Malayu SP Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), , 1.

⁵¹ GR Terry dan LW Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), cet 8, 1

⁵² Peter P Schoderbeck, *etal, Management*, (London: Harcourt Brace Jovanovich Publisher, 1988), 8.

⁵³ Nanang Fattah, *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), 15.

⁵⁴ E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah Konsep, dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 19.

⁵⁵ Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah, : Teori, Mode dan Aplikasi*, 1.

⁵⁶ Ibtisam Abu Duhou, *School-Based Management*, terj Noryamin Aini, dkk, (Jakarta: Logos, 2002), 16.

MBS diterjemahkan dari istilah *School Based Management* (SBM), istilah ini pertama kali pada tahun 1970-an di Amerika Serikat sebagai alternatif untuk mereformasi pengelolaan pendidikan atau sekolah.⁵⁷

Reformasi tersebut diperlukan untuk meningkatkan kinerja sekolah dan memenuhi tuntutan perubahan lingkungan sekolah, seperti tuntutan terhadap peningkatan mutu pendidikan dan tuntutan terhadap mutu lulusan yang relevan dengan dunia kerja.

Meskipun sebenarnya MBS telah cukup lama berkembang dan diterapkan di Mancanegara, namun di Indonesia gagasan untuk menerapkan konsep tersebut baru muncul seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah yang juga berarti otonomi dalam hal pengelolaan sekolah.

“Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia menyebut MBS dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS)”.⁵⁸ MPMBS itu pada hakekatnya merupakan otonomi yang diberikan kepada kepala sekolah untuk secara aktif serta mandiri mengembangkan dan melakukan berbagai program peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan sekolah sendiri.⁵⁹

Definisi MPMBS yang dikemukakan oleh Sugiyono adalah: “Sebagai pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah secara langsung dalam proses pengambilan keputusan untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau untuk mencapai tujuan sekolah dalam rangka kebijakan nasional”⁶⁰

MPMBS merupakan model pengelolaan sekolah di era desentralisasi yang memberikan kewenangan yang lebih luas kepada sekolah untuk menyediakan pendidikan yang bermutu kepada peserta didik. Dengan adanya kewenangan tersebut, maka sekolah memiliki kesempatan yang lebih luas pula untuk meningkatkan kinerja para personel sekolah dan melibatkan masyarakat secara langsung dalam proses perencanaan dan penyelenggaraan pendidikan.

Berbagai pengertian tentang konsep manajemen berbasis sekolah yang telah dijelaskan, maka dari semuanya merupakan satu bentuk keragaman corak berfikir secara ilmiah, akan tetapi yang jelas MBS merupakan suatu pemberian wewenangan bagi sekolah untuk menggali, mengelola, mengembangkan dan mempunyai tanggung jawab atas semua yang dimiliki oleh sekolah. Akibatnya, dalam upaya pencapaian keunggulan masyarakat dalam hal penguasaan ilmu dan teknologi akan mudah dicapai. Akan tetapi yang jelas manajemen berbasis sekolah merupakan suatu pemberian wewenang bagi sekolah untuk menggali, mengelola, mengembangkan, dan mempunyai tanggung jawab atas semua yang dimiliki oleh sekolah. Dengan demikian dalam upaya pencapaian keunggulan masyarakat dalam hal penguasaan ilmu dan teknologi akan mudah dicapai.

Ciri utama dari manajemen berbasis sekolah adalah kemandirian sekolah dalam segala aspek untuk mampu menentukan arah pengembangan, yang semua itu disesuaikan dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakat setempat. Jadi walaupun ada beberapa pengertian berbeda dari beberapa tokoh mengenai pengertian manajemen berbasis sekolah, namun perbedaan itu tidak perlu diperdebatkan secara signifikan, karena dari perbedaan pengertian tersebut mempunyai pengertian yang sama bahwa manajemen berbasis sekolah adalah pengelolaan sumber daya sekolah secara mandiri, di mana sumber daya ada dua macam, yaitu: sumber daya sekolah (kepala sekolah, guru, karyawan, sarana dan lainlain)

⁵⁷ Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah, : Teori, Mode dan Aplikasi*, 1-2.

⁵⁸ *Ibid*, 9.

⁵⁹ Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 82.

⁶⁰ Sugiyono, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Yogyakarta: Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta: 2002), 1.

dan sumber daya manusia luar sekolah (wali siswa, pengguna prasarana lulusan), inilah yang menjadi ciri atau pengertian dari MBS.

2. Hubungan Masyarakat Dengan Pendidikan

Hubungan Madrasah Ibtidaiyah dengan masyarakat mencakup hubungan sekolah dengan sekolah lain, sekolah dengan pemerintah setempat, sekolah dengan instansi dan jawatan lain, dan sekolah dengan masyarakat pada umumnya.⁶¹ Hubungan yang terjalin diharapkan menghasilkan keuntungan satu sama lain. Dan semua hubungan itu merupakan hubungan kerja sama yang bersifat pedagogis, sosiologis, dan produktif.

Oleh sebab itu hubungan madrasah dengan masyarakat sangat penting dan menjadi bagian dari manajemen pendidikan, dalam hal ini dijalankan oleh kepala Madrasah Ibtidaiyah. Adapun tujuannya adalah:⁶²

- a. Mengenalkan pentingnya sekolah bagi masyarakat.
- b. Mendapatkan dukungan dan bantuan moral maupun finansial yang diperlukan bagi sekolah.
- c. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan program sekolah.
- d. Memperkaya atau memperluas program sekolah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
- e. Mengembangkan kerja sama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah dalam mendidik anak-anak.

Dari gambaran di atas dapat diratikan bahwa hendaknya Sekolah/Madrasah dapat bekerja sama dengan organisasi-organisasi atau instansi-instansi lain di dalam masyarakat yang mempunyai tugas dan kepentingan yang sama terhadap pendidikan anak-anak. Misalnya dengan lembaga-lembaga keagamaan, organisasi pramuka, kesenian dan lain-lain.

Hal lain yang dapat dilakukan oleh masyarakat Madrasah ialah kepala Madrasah dan guru-guru hendaknya selalu berusaha untuk dapat bekerja sama dan memanfaatkan sumber-sumber di dalam masyarakat yang diperlukan untuk memperkaya program di madrasah. Dengan memandang masyarakat itu sebagai laboratorium untuk belajar, berarti penting bagi guru-guru untuk mengetahui fasilitas-fasilitas apa yang tersedia di dalam masyarakat yang diperlukan dalam belajar, seperti minat masyarakat terhadap industri yang merupakan faktor masyarakat yang sangat penting diketahui dalam hubungannya dengan program belajar yang *community life centered*.⁶³

Kepala sekolah dan tenaga kependidikan senantiasa menggolongkan partisipasi masyarakat secara continue, karena pasang surutnya kualitas pendidikan baik umum maupun pendidikan agama Islam tidak lain karena adanya keterlibatan masyarakat. Beberapa pendekatan yang dapat dilakukan kepala sekolah dan tenaga kependidikan dalam menggolongkan partisipasi masyarakat yaitu:⁶⁴

- a. Melibatkan masyarakat dalam berbagai program dan kegiatan di Madrasah yang bersifat sosial kemasyarakatan, seperti bakti sosial, perpisahan, Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan Nasional, dan pentas seni. Pelibatan masyarakat disesuaikan dengan hobi, kemampuan dan pekerjaan mereka dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan Sekolah.
- b. Mengidentifikasi tokoh masyarakat, yaitu orang-orang yang mampu mempengaruhi masyarakat pada umumnya. Tokoh tersebut yang pertama kali harus dihubungi, diajak kompromi, konsultasi, dan diminta bantuan untuk menarik masyarakat berpartisipasi

⁶¹ B Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), cet 1, 160.

⁶² M Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), 188.

⁶³ *Ibid*, 191.

⁶⁴ E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional dalam Konteks Menykseskan MBS dan KBK*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), Cet 3,, 173-174.

dalam program dan kegiatan sekolah. Tokoh-tokoh tersebut mungkin berasal dari orang tua peserta didik, figure masyarakat (Kyai), olahragawan, seniman, informal leader, psikolog dan lain sebagainya.

- c. Melibatkan tokoh masyarakat tersebut dalam berbagai program dan kegiatan sekolah yang sesuai dengan minatnya
- d. Memilih waktu yang tepat untuk melibatkan masyarakat sesuai dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.

Peran masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan yaitu sebagai Pemberi pertimbangan (*advisory*), Pendukung (*supporting agency*), Pengontrol (*controlling agency*), Mediator antara pemerintah (*eksekutif*)

Hal yang dapat dilakukan orang tua/masyarakat dalam membantu peningkatan kualitas pendidikan agama Islam khususnya dan pendidikan umum pada umumnya yaitu:⁶⁵

- a. Menciptakan budaya belajar di rumah. Pada jam-jam belajar, orang tua sebaiknya ikut belajar, misalnya membaca al-Qur'an, membaca majalah, menulis puisi, dan menulis program kerja sehingga tercipta budaya belajar.
- b. Memprioritaskan tugas yang terkait secara langsung dengan pembelajaran di Sekolah/Madrasah. Jika banyak kegiatan yang dilakukan anak, maka utamakan yang terkait dengan tugas pembelajaran.
- c. Mendorong anak untuk aktif dalam berbagai kegiatan dan organisasi sekolah, baik yang bersifat kurikuler maupun yang bersifat ekstra kurikuler.
- d. Memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan gagasan, ide, dan berbagai aktivitas yang menunjang kegiatan belajar.
- e. Menciptakan situasi yang demokratis di rumah, agar terjadi tukar pendapat dan pikiran sebagai sarana belajar dan membelajarkan.
- f. Memahami apa yang telah, sedang dan akan dilakukan Sekolah/Madrasah, dalam mengembangkan potensi anaknya.
- g. Menyediakan sarana belajar yang memadai sesuai dengan kemampuan orang tua dan kebutuhan sekolah.

3. Bentuk partisipasi masyarakat dalam peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam

Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan agama Islam yang terimplementasi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam antara lain:⁶⁶

- a. Konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa. Dalam pendidikan, masyarakat mengadakan bimbingan keagamaan yang diprakarsai oleh tokoh ulama setempat.
- b. Sumbangan spontan berupa uang dan barang. Sumbangan ini didasari atas musyawarah seluruh komponen masyarakat yang berkepentingan. Seperti kepala sekolah, guru, siswa, orang tua siswa, tokoh masyarakat, tokoh ulama dan perangkat desa.
- c. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan donornya berasal dari sumbangan individu, kelompok, dan instansi yang berada di luar lingkungan desa.
- d. Mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai seluruhnya oleh komunitas, biasanya diputuskan oleh rapat komunitas sekolah yang menentukan anggarannya.
- e. Sumbangan dalam bentuk kerja, biasanya dilakukan oleh tenaga ahli setempat
- f. Aksi massa atau gotong royong.

Bentuk partisipasi atau peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 39/1992 pasal 4 dan kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam Pendidikan Agama Islam:

⁶⁵ E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesional Dalam konteks Menyukkseskan MBS dan KBK*, 167-168.

⁶⁶ RA Santoso Sastropoetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, 16.

- 1) Pendirian dan penyelenggaraan satuan pendidikan pada jalur pendidikan sekolah atau jalur pendidikan luar sekolah, pada semua jenis pendidikan kecuali pendidikan kedinasan, dan pada semua jenjang pendidikan di jalur pendidikan sekolah.
- 2) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga kependidikan untuk melaksanakan atau membantu pelaksanaan pengajaran, pembimbingan, dan/pelatihan peserta didik. Dalam hal ini masyarakat/orang tua yang kebetulan memiliki keahlian (profesi) dan waktu luang sebagai tenaga pengajar, diharapkan dapat membantu sebagai tenaga pengajar baik sebagai guru bidang studi, guru kelas, maupun guru pembimbing khusus.
- 3) Pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli untuk membantu pelaksanaan kegiatan belajar mengajar dan/atau penelitian dan pengembangan. Hal ini dapat dikatakan bagi masyarakat/orang tua yang memiliki keahlian (profesi) di bidang agama Islam atau lainnya yang relevan dengan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, diharapkan dapat membantu untuk mengidentifikasi, melakukan asesmen dan atau memberikan pembelajaran, pelatihan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus.
- 4) Pengadaan dan atau penyelenggaraan program pendidikan yang belum diadakan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah untuk menunjang pendidikan nasional. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat menyelenggarakan antara lain pusat-pusat sumber (*Resources Center*), pusat-pusat rehabilitasi, dan sejenisnya, yang dapat memberikan pelayanan/bimbingan bagi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus
- 5) Pengadaan dana dan pemberian bantuan yang dapat berupa wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis. Hal ini dapat berarti bahwa masyarakat diharapkan dapat memberikan bantuan baik berupa dana, wakaf, hibah, sumbangan, pinjaman, beasiswa, dan bentuk lain yang sejenis untuk kepentingan pendidikan anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus yang memerlukan.
- 6) Pengadaan dan pemberian bantuan ruangan, gedung dan tanah untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam hal ini, masyarakat diharapkan dapat memberikan bantuan, baik berupa dana dan atau prasarana pendidikan untuk pelaksanaan belajar mengajar di madrasah.
- 7) Pengadaan dana dan pemberian bantuan buku pelajaran dan peralatan pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Disini dapat berarti bahwa masyarakat diharapkan dapat memberikan bantuan, baik berupa dana dan atau bantuan buku-buku pelajaran yang dibutuhkan serta sarana pendidikan untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar di Madrasah.
- 8) Pemberian kesempatan untuk magang dan/atau latihan kerja. Dapat berarti para pengusaha dan atau masyarakat industri diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus dapat magang dan atau latihan kerja di instansinya.
- 9) Pemberian manajemen bagi penyelenggara satuan pendidikan dan pengembangan pendidikan nasional. Dapat diartikan bahwa masyarakat dapat melibatkan diri dalam: membantu (a) merencanakan (*planning*), (b) mengorganisasikan (*organizing*), (c) mengarahkan (*directing*), (d) mengkoordinasikan (*coordinating*), (e) mengawasi (*controlling*), (f) mengevaluasi (*evaluation*) di madrasah.
- 10) Pemberian bantuan dan kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan. Dalam hal ini masyarakat diharapkan dapat memberikan bantuan dan/atau kerja sama dalam kegiatan penelitian dan pengembangan pendidikan agama Islam. Keikutsertaan dalam program pendidikan dan atau penelitian yang diselenggarakan oleh pemerintah di dalam dan/atau di luar Negeri

Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa Secara umum mutu pendidikan yang baik ditentukan oleh beberapa faktor diantaranya adalah faktor *stakeholder*.

Masyarakat sebagai *stakeholder*, dalam perkembangan dan kemajuan pendidikan pada umumnya dan khususnya pendidikan agama Islam sangat dibutuhkan partisipasinya. Sehingga dengan adanya hubungan yang harmonis antara madrasah dan masyarakat peningkatan mutu/kualitas pendidikan agama Islam akan lebih mudah tercapai. Diantara bentuk dukungan masyarakat terhadap madrasah untuk menciptakan pendidikan agama Islam yang berkualitas adalah keikutsertaan dalam berpartisipasi untuk mengembangkan mutu pendidikan, diantara partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat ialah (1) Partisipasi masyarakat dalam manajemen; meliputi partisipasi masyarakat dalam menyusun pengurus madrasah dan partisipasi masyarakat dalam pengangkatan kepala sekolah, pembentukan komite sekolah dan lain-lain. (2) Partisipasi masyarakat dalam kurikulum; mencakup partisipasi masyarakat dalam melaksanakan kurikulum muatan lokal, dan partisipasi masyarakat dalam penentuan hari libur. (3) Partisipasi masyarakat dalam perekrutan siswa; dilakukan oleh beberapa tokoh masyarakat bekerja sama dengan guru, sebelum atau menjelang pelajaran tahun baru. (4) Partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana, sarana dan prasarana; mencakup dana untuk biaya pelaksanaan pendidikan untuk pengadaan sarana dan prasarana. (5) Partisipasi masyarakat dalam berlangsungnya kehidupan beragama di madrasah. Partisipasi ini berupa partisipasi tokoh masyarakat dalam kegiatan beragama di Madrasah. (6) Partisipasi masyarakat dalam penyediaan lapangan kerja.

Daftar Rujukan

- Abdurrahman Saleh Abdullah, *Teori-Teori Pendidikan Berdasarkan Al-Qur'an*, terj H M Arifin dan Zainudin, (Jakarta: Rineka Cipta, 2005)
- Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: al-Ma'arif, 1980)
- Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000
- Ali Yafie, *Mengupas Fiqih Sosial Dari Sosial lingkungan Hidup: Asuransi Hingga Ukhuwah*, Bandung: Mizan, 1995
- B Suryosubroto, *Manajemen Pendidikan di Sekolah*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004
- David G Burnalik, ed, *Webster New World Dictionary*, New York: A Warner Communication Company, 1984
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Alwaah 1993
- E Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Strategi dan Implementasi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2002
- E Mulyasa, *Menjadi Kepala Sekolah Profesioanal dalam Konteks Menykseskan MBS dan KBK*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004)
- F.J. McDonald, *Educational Psycology*, San Fransisco, California, USA: Wadsworth ubPlishing Co., Inc., 1959
- GR Terry dan LW Rue, *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003
- H.A.R. Tilaar, *Paradigma Baru Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000)
- Harun Nasution, *Islam Rasional (Gagasan dan Pemikiran)*, (Bandung: Mizan, 1998)
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan: Umum dan Agama Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persad
- Ibtisan Abu Duhou, *School-Based Management*, terj Noryamin Aini, dkk, Jakarta: Logos, 2002
- Ibrahim Bafadal, *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003)
- Imam Jalaludin al-Mahlly dan Imam Jalaludin As-Suyuti, *Tafsir Jalalin*, jilid I, penerjemah: Balyan Abu Bakar, dkk, (Bandung: Sinar Baru, 1999)
- Jerom W Arcaro, *Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan Dan Tata Langkah Penerapan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005
- Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003

- Moh Idochi Anwar, *Administrasi Pendidikan dan Manajemen Biaya Pendidikan (Teori, Konsep dan Issu)*, Bandung: Al-Fabeta, 2004
- Mustafa al-Ghulayani, *Iddatun Nasyi'in*, Beirut: Maktabah Asriyah li al-Taba'at wa al-Nasyr, 1953
- M. Chabib Thoaha, *Kapita Selektta Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996
- Malayu SP Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- M Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000
- Nurkholis, *Manajemen Berbasis Sekolah, : Teori, Mode dan Aplikasi*, Jakarta: Grasindo, 2003
- Oemar Hamalik, *Evaluasi Kurikulum*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1992
- Qodri A Azizy, *Pendidikan (Agama) Untuk Membangaun Etika Sosial (Mendidik Anak Sukses Untuk Masa Depan: Pandai dan Bermanfaat)*, Semarang: CV Aneka Ilmu, 2003
- RA Santoso Sastropoetro, *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi dan Disiplin dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, 1988
- Syaiful Sagala, *Manajemen Berbasis Sekolah Dan Masyarakat Strategi Memenangkan Persaingan Mutu*, Jakarta: PT Nimas Multima, 2004
- S Nasution, *Pengembangan Kurikulum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1993
- Soebagio Admodiwirio, *Manjemen Pendidikan Indonesia*, Jakarta: PT Ardadizya Jaya 2000
- Suyanto, *Optimalisasi Peran Komite Sekolah dan Dewan Pendidikan*, Semarang: Lembaga Kajian dan Pengembangan Pendidikan, 2003
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Tengku Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Ilmu Fikih*, Semarang: Riski Putra, 1999
- Umar Tirtorahardjo, et al, *Pengantar Pendidikan*, Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan bekerjasama dengan Rineka Cipta, 1998
- Usman Abu Bakar - Surohim, *Fungsi Ganda Lembaga Penidikan Islam (Respon Kreatif Terhadap Undang-Undang Sisdiknas)*, Yogyakarta: Safiria Insani Press, 2005
- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 *Tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dan Penjelasannya*, Jogjakarta: Media Wacana Press, 2003
- Zakiah Darajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996
- Zuhairini, dkk, *Metode Khusus Pendidikan Agama*, (Malang: Biro Alamiah FT IAIN Sunan Ampel, 1991), 13.